

Meningkatnya efisiensi pengawasin minimal Pemda
Meningkatnya kualitas penerapan SAKP SKPD di Pemda

Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat
Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler Inspektoriat dan BPK RI
Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Meningkatnya penerapan SPP Pemerintah Kab Tapin

Persentase penurunan jumlah temuan tidak sesuai dengan regulasi daerah
Persentase SKPD yang mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP
Persentase aduan masyarakat yang ditangani sampai selesai
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah selesai ditindaklanjuti
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah selesai ditindaklanjuti
Level kapabilitas pengawasin intern Minimal "Integrator" (Level 3)
Level maturan Pemda Minimal "Definifinal" (Level 3)

Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu Wilayah I
Meningkatnya kepatuhan SKPD mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP di Inspektur Pembantu Wilayah I
Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur Pembantu Wilayah I sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatnya penerapan SPP SKPD di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah I
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu
Persentase SKPD yang mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP tepat waktu
Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu
Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPP dengan hasil minimal level 3

Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu Wilayah II
Meningkatnya kepatuhan SKPD mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP di Inspektur Pembantu Wilayah II
Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur Pembantu Wilayah II sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatnya penerapan SPP SKPD di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah II
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu
Persentase SKPD yang mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP tepat waktu
Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu
Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPP dengan hasil minimal level 3

Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu Wilayah III
Meningkatnya kepatuhan SKPD mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP di Inspektur Pembantu Wilayah III
Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur Pembantu Wilayah III sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatnya penerapan SPP SKPD di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah III
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu
Persentase SKPD yang mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP tepat waktu
Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu
Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPP dengan hasil minimal level 3

Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu Wilayah IV
Meningkatnya kepatuhan SKPD mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP di Inspektur Pembantu Wilayah IV
Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur Pembantu Wilayah IV sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatnya penerapan SPP SKPD di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah IV
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu
Persentase SKPD yang mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP tepat waktu
Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu
Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPP dengan hasil minimal level 3

Meningkatnya cakupan pemeriksaan reguler pada Inspektur Pembantu Wilayah V
Meningkatnya kepatuhan SKPD mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP di Inspektur Pembantu Wilayah V
Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan masyarakat di Inspektur Pembantu Wilayah V sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Meningkatnya penerapan SPP SKPD di wilayah Inspektur Pembantu Wilayah V
Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pemeriksaan reguler tepat waktu
Persentase SKPD yang mendalajarkanj rekomendasi hasil evaluasi SAKP tepat waktu
Persentase aduan masyarakat yang ditangani tepat waktu
Persentase SKPD yang dievaluasi penerapan SPP dengan hasil minimal level 3

Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Reguler dan BPK RI
Meningkatnya Hasil Quality Assurance Per Elemen Kapabilitas: Aparat Pengawasan Intern
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektoriat Kab Tapin
Meningkatnya kualitas perencanaan pengawasin Inspektoriat Kab Tapin sesuai kebijakan pengawasin
Meningkatnya sumber daya manusia pengawasin yang kompeten
Meningkatnya pelaksanaan administrasi kantor Inspektoriat Kabupaten Tapin
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan reguler yang telah ditindaklanjuti tepat waktu
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti tepat waktu
Persentase Self Assessment Per Elemen dengan kemampuan elemen level 3
Produktif hasil evaluasi SAKP Inspektoriat Kab Tapin Minimal 88
Dokumen PPPF yang sudah berbasis risiko

Tertarikannya PPKT
Tertarikannya Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA RPAS Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPH Tepat Waktu
Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tepat Waktu
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu tepat waktu

Tertarikannya PPKT
Tertarikannya Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA RPAS Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPH Tepat Waktu
Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tepat Waktu
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu tepat waktu

Tertarikannya PPKT
Tertarikannya Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA RPAS Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPH Tepat Waktu
Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tepat Waktu
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu tepat waktu

Tertarikannya PPKT
Tertarikannya Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA RPAS Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPH Tepat Waktu
Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tepat Waktu
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu tepat waktu

Tertarikannya PPKT
Tertarikannya Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA RPAS Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPH Tepat Waktu
Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tepat Waktu
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu tepat waktu

Tertarikannya PPKT
Tertarikannya Pemeriksaan Khusus/ Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi LAKIP SKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu KUA RPAS Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu LPFD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Reviu Dana Alokasi Khusus Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi SPH Tepat Waktu
Jumlah Laporan Monitoring Penyerapan Anggaran/ Pemeriksaan Kas Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Dana Desa Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Bantuan Operasional Sekolah Tepat Waktu
Jumlah Laporan Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Tepat Waktu
Jumlah Laporan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/ Tujuan Tertentu tepat waktu

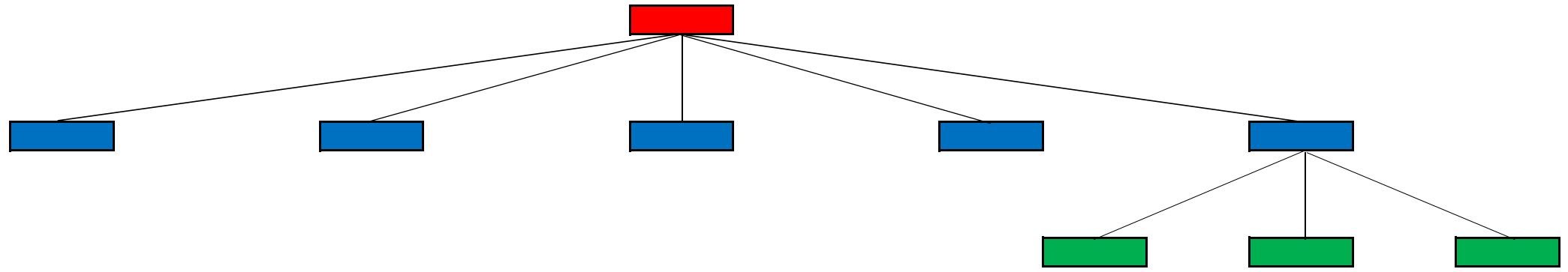
Terusannya informasi tentang pengawasin
Tertarikannya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan reguler
Tertarikannya peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi laporan hasil pemeriksaan Reguler Inspektoriat
Terusannya Laporan Kinerja Inspektoriat
Terusannya Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Terusannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Tertarikannya peningkatan laporan hasil pengawasan sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Pemerintahan Tidak Larjut Hasil
Jumlah dokumen Rekapitulasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI secara berkala
Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi APBD Tepat Waktu
Jumlah Laporan Kinerja yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang disusun sesuai ketentuan

Tertarikannya peningkatan profesionalisme aparatur pengawasin
Terusannya EGA kepengawasan evaluasi, serta peningkatan kepegawasin SAKP
Terusannya laporan keuangan
Tertarikannya rencana pengadaan sarpras
Tertarikannya administrasi perkantoran
Tertarikannya Self assessment Kapabilitas APIP
Terusannya dokumen penganggaran
Jumlah laporan pengawasin yang mengulangi pelanggaran berturut-turut
Jumlah pejabat yang administrasi kepegawasinnya dilayani secara tertib
Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan
Jumlah dokumen terkait sarana dan prasarana
Jumlah dokumen pelayanan surat menyurat
Jumlah pengamatan dengan hasil atau tidak dokumen yang memadai relevan dan kuat
Jumlah dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektoriat

Terusannya pengim birokrasi pengawasin tahunan
Terusannya dokumen perencanaan
Terusannya indikator Kinerja Utama
Terusannya Penjajaban Kinerja
Terusannya Rencana Tidak Pengendalian
Tertarikannya pengelolaan dokumentasi hukum
Tertarikannya Koordinasi pengawasin dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan
Jumlah dokumen program kerja pengawasin tahunan
Jumlah dokumen Rencana Inspektoriat
Jumlah Dokumen Rencana Kerja Inspektoriat
Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Inspektoriat
Jumlah dokumen Indikator Kinerja Utama Inspektoriat
Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Inspektoriat
Jumlah dokumen Rencana Tidak Pengendalian Inspektoriat
Jumlah dokumentasi hukum Inspektoriat
Jumlah dokumen koordinasi pengawasin dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan

Inspektur Kabupaten Tapin

Unda Absori, SH, MH
Pemda TA
NP. 19/700722.200501.1.013



Rp 665,000

Rp 855,000

Rp 712,500

Rp 2,280,000

Rp 522,500

Rp 5,035,000